

KEBIJAKAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KOTA MANADO

**Amelia Lasut
Jantje Mandey
Gustaf BudiTampi**

Abstract: Controlling population growth rate is an attempt to suppress the human birth rate in order to create a society that is in harmony with the natural capacity. Especially for the city of Manado, Manado city population growth each year has increased, with an average growth rate of 1.1%. To suppress the population growth rate, Indonesia enacting Law No. 52 Year 2009 on Population Development and Family Development. Presence of Women Empowerment and Family Planning at national and local levels are expected to control the population growth rate both nationally and locally.

This study aims to determine how the policy Women Empowerment and Family Planning Manado in controlling the rate of population growth in the city of Manado. The method used is a qualitative research method with data collection techniques used is the study of documentation, interviews and observation.

The results of this study indicate that the policy of Women Empowerment and Family Planning Manado in controlling the population growth rate is the implementation of the Family Planning (KB). Policy supporting factors, among others: the regulatory system, local regulations and rules mayor of Manado, the Regional Government commitment to family planning and the Empowerment of Women designated by maketh revitalize family planning programs become part of the Development Plan 2011-2015; Commitment partners who are good enough to support the policy of Family Planning and Women's Empowerment; Community participation in planning programs and the Empowerment of Women in Manado City; and competence of employees adequate apparatus. The efforts undertaken include: Mobilizing and empowering the whole community in the program and the Empowerment of Women; Operation strengthen human resources; Improving the survival and well-being of the family; Ensure the availability of contraceptives and service program for all participants; Improved access to information and reproductive health services; Granting Extension and IEC to members of the PKK, public and Religion through the container meetings PKK village in Posyandu, as well as a group meeting activities to raise family welfare (Generating), group activities of family resilience (BKB, BKR and BKL) by the extension staff planning in the field of the importance for families to the preservation of family planning; Conducting communication and interpersonal counseling (KIP-Counseling) to the EFA are not family planning through home visits by KB officers (PKB).

Keywords: *Population Growth Rate, Women's Empowerment, Family Planning.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk dipahami sebagai perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Pengertian lainnya adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah sebuah upaya untuk menekan angka kelahiran manusia guna menciptakan masyarakat yang selaras dengan daya tampung alam. Di Indonesia, pertumbuhan penduduk menjadi sebuah fenomena yang tak terhindarkan. Jumlah jiwa Indonesia mencapai peringkat 4 dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Semakin banyaknya jumlah penduduk akan mempengaruhi sektor kehidupan yang lain. Dalam hal kehidupan sosial, kriminalisasi dan marginalisasi penduduk bisa menjadi salah satu dampak dari tingginya jumlah penduduk. Dalam hal sanitasi, dengan adanya jumlah penduduk yang banyak akan mempengaruhi kebersihan lingkungan karena semakin tinggi produksi sampah yang akan dihasilkan dari jumlah penduduk yang banyak. Untuk mengimbangi dan menekan laju pertumbuhan penduduk, maka Indonesia memberlakukan Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009. Selain itu,

hadirnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di tingkat Nasional maupun lokal diharapkan dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara nasional maupun lokal.

Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi masalah jumlah penduduk, yaitu Menganalkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional. Keluarga Berencana (KB) adalah suatu program yang dicanangkan pemerintah dalam upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Menurut Winarno (2012: 19), Secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan Anderson (1969), mendefinisikan kebijakan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Rahardjo, (2010) yang mengutip Duke dan Canady, mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu: (1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, (2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, (3) kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, (4) kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, (5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, (6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif, (7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, dan (8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem

Khusus untuk Kota Manado, pertumbuhan penduduk Kota Manado setiap tahun mengalami peningkatan, dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,1% (BPS Kota Manado, 2011). Kota Manado sebagai salah satu dari Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara, merupakan kota yang sedang berkembang dengan dinamika pembangunan yang dinamis, terus berpacu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kunci peningkatan dan pencapaiannya terletak dari sistem perencanaan yang handal. (Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Manado 2015-2019). Pada tahun 1978 ia menerbitkan buku analisis kependudukan berjudul "Essay On The Principle of Population" dan mempertahankan pendapatnya bahwa "natural law" atau hukum alamiah yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan penduduk. Dalil yang dikemukakan Malthus yaitu *bahwa jumlah penduduk cenderung untuk meningkat secara geometris (deret ukur), sedangkan kebutuhan hidup riil dapat meningkat secara arismetik (deret hitung)*. Menurut pendapat Malthus ada faktor-faktor pencegah yang dapat mengurangi kegoncangan dan kepincangan terhadap perbandingan antara penduduk dan manusia yaitu dengan jalan Preventive checks dan Positive checks. *Preventive checks*: faktor-faktor yang dapat menghambat jumlah kelahiran yang lazimnya dinamakan moral restraint. Termasuk didalamnya antara lain:Penundaan masa perkawinan; Mengendalikan hawa nafsu; dan Pantangan kawin. *Positive checks*: faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya kematian, termasuk di dalamnya antara lain:Bencana Alam; Wabah penyakit; Kejahatan; dan Peperangan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa fakta dan permasalahan yang terjadi di Kota Manado dalam hubungannya

dengan pertumbuhan penduduk, diantaranya adalah:

- 1) Bertambahnya penduduk berarti meningkat pula tingkat kepadatan penduduk di Kota Manado, sementara itu luasan lahan permukiman semakin menyempit sebagai konsekuensi meningkatnya jumlah penduduk;
- 2) Bertambahnya penduduk juga menyebabkan produksi sampah dan air limbah meningkat, apalagi bila sarana dan prasarana sanitasi belum memadai yang akan berdampak buruk terhadap kesehatan lingkungan seperti meningkatnya angka kesakitan dan bahkan angka kematian bayi;
- 3) Kurangnya aparatur sipil negara di bidang KB sehingga pelaksanaan program kebijakan di bidang pertumbuhan penduduk melalui KB kurang berjalan dengan maksimal;
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk karena masih rendahnya sumber daya manusia;
- 5) Dukungan infrastruktur, sarana pendukung berupa transportasi dan lainnya belum menunjang pelaksanaan program;
- 6) Partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan program KB kurang berjalan karena faktor pemahaman yang keliru mengenai program KB.

Persoalan tersebut merupakan beberapa tantangan yang hendak dijawab oleh badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kota Manado. Oleh karena itu untuk mengatur jumlah kelahiran, wanita diprioritaskan untuk menggunakan alat/metode KB. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) adalah cakupan peserta KB aktif yang pada tahun 2012 baru mencapai 35,4% belum mencapai target tahun kedua RPJMD Kota Manado yang ditargetkan yaitu 82,22%. Capaian ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 79,35%. (RPJMD Kota Manado,2010-2015)

Adapun upaya yang dilakukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Manado untuk pencapaian target dimaksud adalah dengan menekankan:

- 1) Pemberian Penyuluhan dan KIE kepada anggota PKK, Tokoh Masyarakat dan Agama melalui wadah pertemuan PKK Lingkungan/Kelurahan di Posyandu, serta pertemuan kelompok kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga (UPPKS), kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) oleh petugas penyuluh KB di lapangan tentang pentingnya bagi keluarga untuk kelestarian ber KB.

- 2) Melakukan kegiatan komunikasi interpersonal konseling (KIP-Konseling) kepada PUS yang tidak ber KB melalui kunjungan rumah oleh petugas KB (PKB) bersamakader KB (PPKBD dan Sub PPKBD).
- 3) Melakukan pelayanan kontrasepsi ulangan kepada PUS yang ber KB agar tidak putus pakai alat kontrasepsi di Puskesmas, Mobil Pelayanan KB di Kelurahan/kelurahan, Kantor BKB-PP dan Pos alat KB Desa (PAKBD) pada kader KB. Melakukan pelayanan KB Baru bagi Keluarga Baru (menunda kehamilan) dan bagi PUS yang baru melahirkan (Penjarangan Kelahiran). Melakukan pelayanan KB bagi PUS yang tidak pakai KB (tidak ingin anak lagi).
- 4) Droping ketersediaan alat kontrasepsi ke Klinik KB di Pustu, Puskesmas, Klinik KBSwasta dan PAKBD.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Manado

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado.

B. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Manado, tepatnya pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Perencanaan waktu yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah tiga bulan (Bulan Januari-Maret 2016).

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian adalah narasumber atau partisipan dan informan, yang berjumlah 6 orang yang dalam hal ini adalah pegawai yang bekerja di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Manado.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Instrumen lain, yakni: dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kebijakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, baik yang berupa pustaka/literature

perpustakaan maupun dokumen yang berasal dari instansi terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik sensus Penduduk yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Menurut Sugiyono, (2009: 225), teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah Observasi Partisipasi (*participan Observation*), wawancara mendalam (*in depth Interview*), dan studi dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model *Spradley*. Menurut model ini, sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, (2010:254-255), ada empat macam analisis data kualitatif, antara lain: analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado

Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado, sesuai dengan data yang diperoleh, diketahui bahwa kebijakan yang diambil adalah dengan penerapan program Keluarga Berencana (KB). Secara nasional, Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi masalah jumlah penduduk, yaitu Menganalkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Pencanangan program KB secara nasional dilakukan dengan cara memperkenalkan tujuan-tujuan program KB melalui jalur pendidikan, mengenalkan alat-alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak.

Di Kota Manado, kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui program keluarga berencana. Dalam RPJMD kota Manado 2012. Salah satu unsur penting yang ditekankan di sana adalah kebijakan untuk Membangun Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan sarannya adalah Program dan kegiatan Keluarga Berencana, Perlindungan Anak dan Remaja, *Gender mainstreaming* dilanjutkan dan ditingkatkan. Kebijakan ini dilakukan dengan cara:

1. Menjamin ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan program bagi seluruh peserta KB,

khususnya dalam pemberian kontrasepsi gratis bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 atau keluarga miskin lainnya serta peningkatan kesertaan KB pria;

2. Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dalam merencanakan kehamilan serta meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak untuk mewujudkan keluarga sehat dengan anak ideal;
3. Pembinaan KIE program KB dan meningkatkan pengetahuan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Manado;
4. Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan perkembangan anak, pembinaan kesehatan ibu, bagi anak dan remaja serta pembinaan lingkungan keluarga secara terpadu melalui posyandu kelompok kegiatan bina keluarga;
5. Pengoptimalan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan untuk meneguhkan program kegiatan kepada masyarakat; dan
6. Pemberian kualitas dan kuantitas SDM di lini lapangan dan kualitas manajemen pengelolaan program KB dan Pemberdayaan Perempuan.

B. Faktor penunjang kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado

Faktor penunjang kebijakan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Manado antara lain adalah:

- Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI serta Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis daerah Kota Manado;
- Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap program KB dan Pemberdayaan Perempuan yang ditunjuk dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dalam RPJM 2011-2015;
- Peraturan Walikota Manado nomor 37 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan memperjelas pembagian kewenangan dalam mengelola program

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan program KB dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Manado;
- Setiap aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya dalam rangka administrasi yang transparan dan akuntabel.

C. Faktor penghambat kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado

Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado, antara lain adalah:

- Menurunnya jumlah tenaga lapangan KB (rata-rata seorang PLKB/PKB membina 3 atau 4 kelurahan)
- Semakin menurunnya jumlah dan kualitas SDM dan pelaksana karena pensiun, pindah dan penyesuaian pegawai baru dalam bidangnya
- Belum meratanya keterampilan tenaga pelayanan dalam berkomunikasi dengan klien, agar proses *informed choice* dapat berjalan dengan baik.
- Bertambahnya penduduk sementara itu luasan lahan permukiman semakin menyempit;
- Bertambahnya produksi sampah dan air limbah meningkat,
- sarana dan prasarana sanitasi belum memadai yang berdampak buruk terhadap kesehatan lingkungan seperti meningkatnya angka kesakitan dan bahkan angka kematian bayi;
- Kurangnya aparatur sipil negara di bidang KB sehingga pelaksanaan program kebijakan di bidang pertumbuhan penduduk melalui KB kurang berjalan dengan maksimal;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk karena masih rendahnya sumber daya manusia;
- Dukungan infrastruktur, sarana pendukung berupa transportasi dan lainnya belum menunjang pelaksanaan program;
- Partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan program KB kurang berjalan karena faktor pemahaman yang keliru mengenai program KB.

D. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Manado.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dari Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Manado, adalah:

- Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB dan Pemberdayaan Perempuan;
- Memperkuat SDM operasi program KB dan Pemberdayaan Perempuan;
- Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan.
- Menjamin ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan program bagi seluruh peserta KB, khususnya dalam pemberian kontrasepsi gratis bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I atau keluarga miskin lainnya serta peningkatan kesertaan KB pria;
- Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dalam merencanakan kehamilan serta meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak untuk mewujudkan keluarga sehat dengan anak ideal;
- Pembinaan KIE program KB dan meningkatkan pengetahuan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Manado;
- Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan perkembangan anak, pembinaan kesehatan ibu, bagi anak dan remaja serta pembinaan lingkungan keluarga secara terpadu melalui posyandu kelompok kegiatan bina keluarga;
- Pengoptimalan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan untuk meneguhkan program kegiatan kepada masyarakat; dan
- Pemberian kualitas dan kuantitas SDM di lini lapangan dan kualitas manajemen pengelolaan program KB dan Pemberdayaan Perempuan.
- Pemberian Penyuluhan dan KIE kepada anggota PKK, Tokoh Masyarakat dan Agama melalui wadah pertemuan PKK Lingkungan/Kelurahan di Posyandu, serta pertemuan kelompok kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga (UPPKS), kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) oleh petugas penyuluh KB di lapangan tentang pentingnya bagi keluarga untuk kelestarian ber KB.

- Melakukan kegiatan komunikasi inter personal konseling (KIP-Konseling) kepada PUS yang tidak ber KB melalui kunjungan rumah oleh petugas KB (PKB) bersama kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD).
- Melakukan pelayanan kontrasepsi ulang kepada PUS yang ber KB agar tidak putus pakai alat kontrasepsi di Puskesmas, Mobil Pelayanan KB di Kelurahan/kelurahan, Kantor BKB-PP dan Pos alat KB Desa (PAKBD) pada kader KB. Melakukan pelayanan KB Baru bagi Keluarga Baru (menunda kehamilan) dan bagi PUS yang baru melahirkan (Penjarangan Kelahiran). Melakukan pelayanan KB bagi PUS yang tidak pakai KB (tidak ingin anak lagi).
- Droning ketersediaan alat kontrasepsi ke Klinik KB di Pustu, Puskesmas, Klinik KB Swasta dan PAKBD.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado dengan penerapan program Keluarga Berencana (KB). Untuk menunjang kebijakan tersebut, maka ada beberapa faktor penunjang kebijakan antara lain: sistem perundang-undangan, peraturan daerah dan peraturan Walikota Kota Manado, Komitmen pemerintah Daerah terhadap program KB dan Pemberdayaan Perempuan yang ditunjuk dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dalam RPJM 2011-2015; Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan program KB dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Manado; dan kompetensi aparatur pegawai yang memadai.
2. Faktor penghambat kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado adalah: Menurunnya jumlah tenaga lapangan KB (rata-rata seorang PLKB/PKB membina 3 atau 4 kelurahan); Semakin menurunnya jumlah dan kualitas SDM dan pelaksana karena pensiun, pindah dan penyesuaian pegawai baru dalam bidangnya; dan belum meratanya keterampilan tenaga pelayanan dalam berkomunikasi dengan klien, agar proses *informed choice* dapat berjalan dengan baik serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang program KB untuk menekan laju

pertumbuhan penduduk karena masih rendahnya sumber daya manusia; dan Dukungan infrastruktur, sarana pendukung berupa transportasi dan lainnya belum menunjang pelaksanaan program;

3. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Manado adalah: Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB dan Pemberdayaan Perempuan; Memperkuat SDM operasi program KB dan Pemberdayaan Perempuan; Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan; Menjamin ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan program bagi seluruh peserta KB, khususnya dalam pemberian kontrasepsi gratis bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I atau keluarga miskin lainnya serta peningkatan kesertaan KB pria; Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dalam merencanakan kehamilan serta meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak untuk mewujudkan keluarga sehat dengan anak ideal; Pembinaan KIE program KB dan meningkatkan pengetahuan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Manado; Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan perkembangan anak, pembinaan kesehatan ibu, bagi anak dan remaja serta pembinaan lingkungan keluarga secara terpadu melalui posyandu kelompok kegiatan bina keluarga; Pengoptimalan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan untuk meneguhkan program kegiatan kepada masyarakat; Pemberian kualitas dan kuantitas SDM di lini lapangan dan kualitas manajemen pengelolaan program KB dan Pemberdayaan Perempuan; Pemberian Penyuluhan dan KIE kepada anggota PKK, Tokoh Masyarakat dan Agama melalui wadah pertemuan PKK Lingkungan/Kelurahan di Posyandu, serta pertemuan kelompok kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga (UPPKS), kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) oleh petugas penyuluh KB di lapangan tentang pentingnya bagi keluarga untuk kelestarian ber KB; Melakukan kegiatan komunikasi inter personal konseling (KIP-Konseling) kepada PUS yang tidak ber KB melalui kunjungan rumah oleh petugas KB (PKB) bersama kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD); Melakukan pelayanan kontrasepsi

ulangan kepada PUS yang ber KB agar tidak putus pakai alat kontrasepsi di Puskesmas, Mobil Pelayanan KB di Kelurahan, Kantor BKB-PP dan Pos alat KB Desa (PAKBD) pada kader KB. Melakukan pelayanan KB Baru bagi Keluarga Baru (menunda kehamilan) dan bagi PUS yang baru melahirkan (Penjarangan Kelahiran). Melakukan pelayanan KB bagi PUS yang tidak pakai KB (tidak ingin anak lagi); dan Droning ketersediaan alat kontrasepsi ke Klinik KB di Pustu, Puskesmas, Klinik KB Swasta dan PAKBD.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Program KB adalah salah satu jalan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Manado. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan positif dari para pegawai di bidangnya untuk memberikan penyuluhan dan memberikan pemahaman akan pentingnya penggunaan KB bagi peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Diketahui bahwa adanya beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan kurang berjalan dengan baik, oleh karena itu maka sangat diharapkan pemerintah Kota Manado agar memenuhi beberapa hambatan tersebut melalui kebijakan konkret seperti penambahan sarana dan prasarana, penambahan jumlah tenaga di lapangan dan peningkatan kesejahteraan pegawai agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik;
3. Untuk membantu pemerintah, sangat diharapkan peran masyarakat dalam menunjang kebijakan melalui para tokoh masyarakat, tokoh agama, para dokter dan perawat dan tenaga kependidikan untuk memberikan pemahaman yang baik bagi warga masyarakat demi terlaksananya kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk demi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo, H. Mudjia, (2010). *Tahapan Analisis Kebijakan Pendidikan*, dalam <http://ide2-pendidikan.blogspot.com/2009/06/3-tahapan-analisis-kebijakan-pendidikan.html> (Senin 01 Februari 2010).

- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Winarno, Budi, (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: CAPS).
- Pemerintah Kota Manado, *Evaluasi RPJMD Tahun Kedua*, “RPJMD Kota Manado 2010-2015”,(Manado, 2013).
- Pemerintah Kota Manado, *Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Manado 2015-2019*
- Peraturan Walikota Manado nomor 37 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis daerah Kota Manado.